

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum

Hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasinya di negara kita Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang undang-undang atau hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan.

Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi masyarakat, maka hukum tersebut akan berada di belakang kasus-kasus masyarakat yang semakin banyak dan rumit. Direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian dalam Negeri Republik Indonesia adalah pusat yang memegang peranan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Catatan sipil dengan ketentuan perundang undangan dalam melaksanakan tugasnya ,selanjutnya peran tersebut pastinya di perpanjang ditangani oleh masing masing daerah atau yang sering disebut otonomi daerah .melalui pelaksanaan penelitian proposal penulisan ini akan membahas mengenai

“Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.”

Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Kementrian Dalam Negeri akhirnya memberlakukan Kartu Identitas anak (KIA) yang tercantum Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Diharapkan menjadi kartu identitas anak bagi anak, selanjutnya disingkat menjadi KIA sebagai identitas resmi untk bukti diri anak yang berusia kurang dari

17 tahun dan belum menikah yang dahulunya hanya ada akta kelahiran sekarang seluruh anak dari usia 0-17 tahun harus mempunyai kartu identitas anak yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten indramayu tepatnya dibagian pendaftaran penduduk (Dapduk) yang mempunyai produk pelayanan diantaranya ada kartu keluarga ,kartu identitas anak ,pindah datang keluar kota ,pindah dalam kota.

Sesuai dengan pasal 2 dalam peraturan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk meningkatkan pendataan dan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara KIA(Kartu Identitas Anak) memiliki 2 Jenis :

1. Kartu Identitas Anak berusia 0-5 tahun
2. Kartu Identitas Anak berusia 5-17 tahun

Syarat mendapatkan KIA cukup dengan melampirkan Akta kelahiran KK(kartu keluarga) dan KTP orang tua (kartu tanda penduduk) bagi anak usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar masa berlaku KIA diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari

Untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan pemberian layanan KIA bisa didapatkan pada kegiatan memberikan pelayanan keliling laboling D'Ayu (pelayanan rebo keliling) kedaerah nya ,gerakan sadar Administrasi (GISA) dimana pelayanan yang di berikan langsung kedaerah daerah tersebut

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara dalam konsitusi indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap atas keberlangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tujuan dan kepentingan terbaik pada anak harus didahulukan ,sebagaimana ditegaskan dalam konvensi intermasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Pengesahan Tenta

Perlindungan terhadap Anak yang selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, schingga dalam melaksanakan perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak:

1. Tidak berbudaya tanpa larangan apapun
2. Kepentingan terbaik anak bahwa semua tindakan yang terbaik bagi anak harus di pertimbangkan
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan bahwa hidup yang melekat di setiap anak harus diakui dan hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembanganya harus dijamin
4. Penghargaan terhadap pempapatan anak (menghormati pendapat anak) bahwa pendapat anak yang bergantung dan memengaruhi kehidupanya perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan

Hak yang didapat oleh anak selain mendapatkan perlindungan identitas sangat penting bagi anak karena identitas anak dapat memperoleh perlindungan, seperti hubungan dalam UU No.35 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 yang berbunyi:

1. Identitas diri anak setiap harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal Anak yang lahirnya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada
5. Keterangan orang yang proses dan perlengkapan berita acara pemeriksaan kepolisian.

Adanya KIA ini bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Hal ini yang terlihat oleh penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu, menurut hasil pengamatan penulis bahwa implementasi Kartu Identitas Anak belum menerapkan hal ini terlihat dari:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Sistem Kartu identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

2. Kurangnya sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang menjelaskan bahwa belum implementasi kebijakan optimalnya kartu identitas anak di dinas kependudukan dan penatatan sipil kabupaten indramayu

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Impelementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Impelementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Indramayu ?
3. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten indramayu ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu
2. Faktor - faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Indramayu

3. Untuk memperoleh upaya apa saja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a) dapat memberikan informasi dan masukan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten indramayu
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya dengan obyek yang sama

2. Secara praktis diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi public yang terkait dengan implementasi kebijakan
- b) Sebagai bahan latihan bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik yang diperoleh selama proses perkuliahan

1.6 Kerangka Pemikiran

Pendekatan yang Implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III dalam Widodo (2010;96) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah direct and indirect impact on implementation dalam pendekatan yang diteorematkan oleh

Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu; (i) komunikasi; (ii) sumberdaya ;(iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi

Variabel yang pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik

Terdapat tiga indikator yang dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini dapat disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan
- b) kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksanaan kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
- c) konsistensi pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan)

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya sumberdaya merupakan hal penting lainnya menurut George C Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber – sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

- a) Staf sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumberdaya manusia (SDM) kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi adalah oleh karena staf tidak mencukupi
- b) informasi dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu ;
 - a. informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan
 - b. informasi mengenai data kepatuhan pelaksanaan terhadap dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi George C. Edward III adalah disposisi sikap atau dari pelaksanaan kebijakan publik

1. Efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata
2. Melakukan pengaturan birokrasi dalam konteks ini Edward III menyatakan implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi
3. Insentif Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah manipulasi

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi

implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang termasuk interaksi

Marilee S . Grindle suatu implementasi kebijakn publik dapat diukur dari proses pencapaian aoutcomes(yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih yang amana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut ;

1. Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang di tentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya
2. Apakah tjuan kebijakan tercapai dimensi ini di ukur dengan melihat dua faktor yaitu:
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok
 - b. tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompokdan sasaran dan perubahan yang terjadi

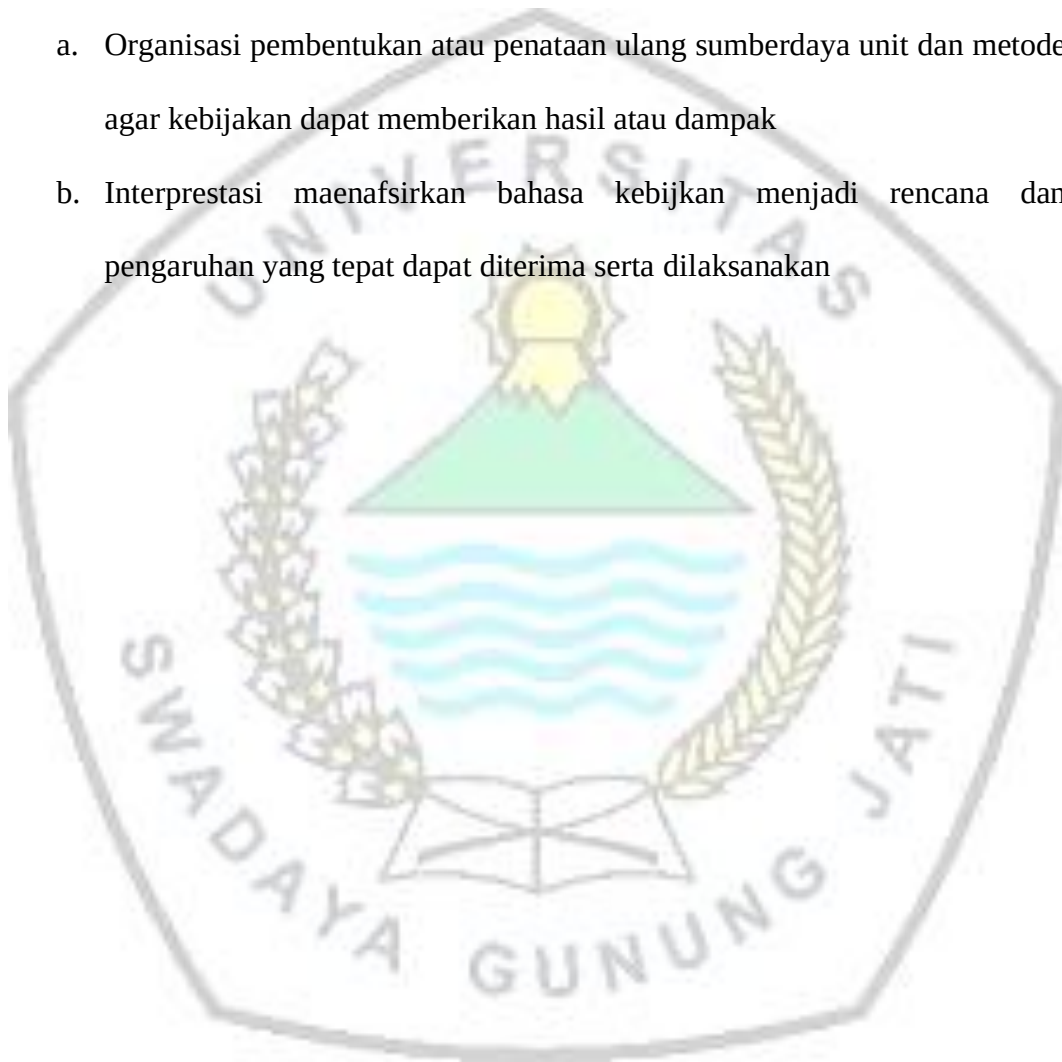
Daniel H. Mazmanian & paul A,Sabatier implementasi yang ditawarkan mereka disebutdengan A Framework for policy implementation analysis kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuanya dalam mengidentifikasi kan variabel –variabel yang mempengaruhi tercapainya ujuan tujuan formal pada keseluruhan proses implemtasi

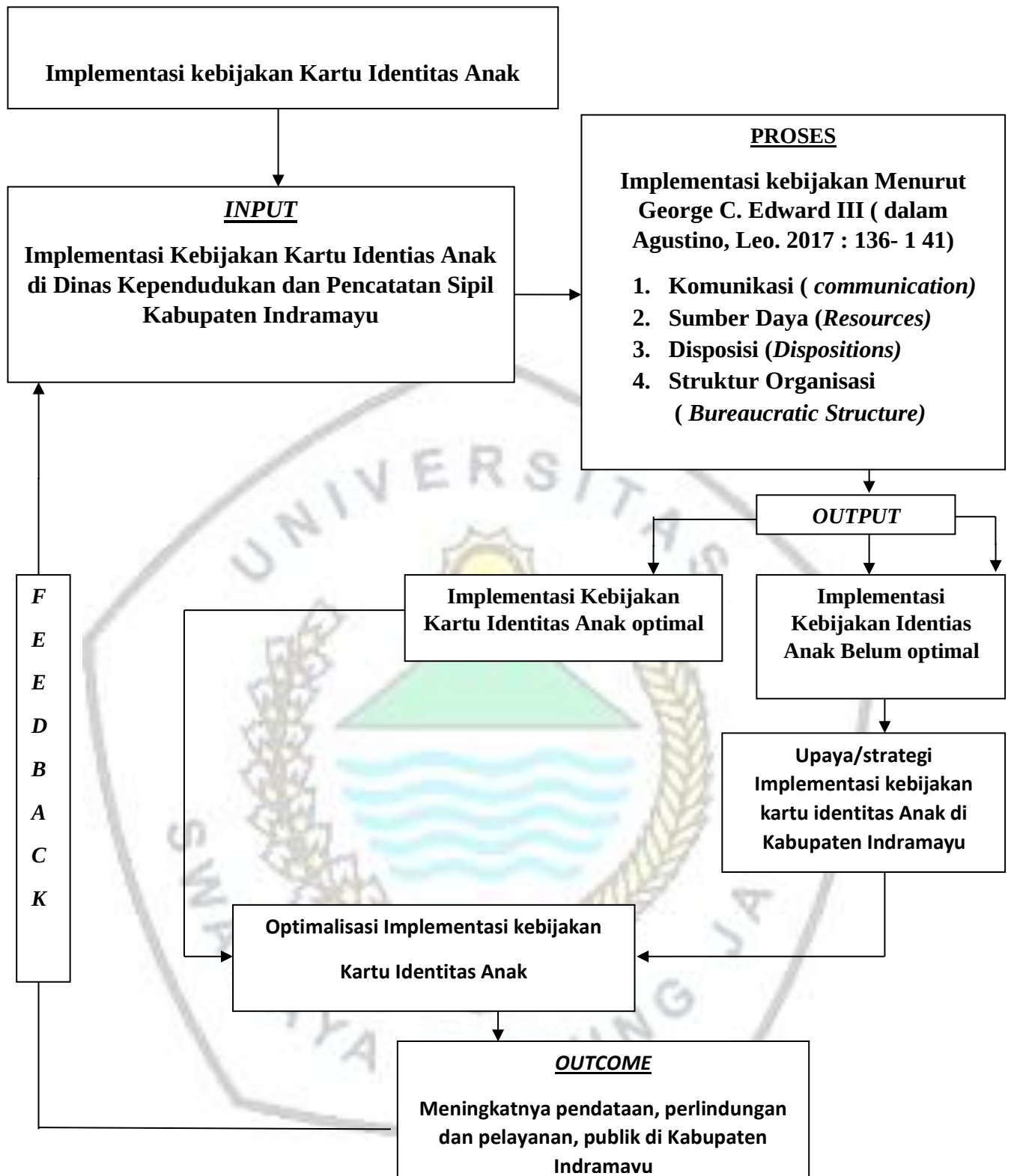
Thomas R .Dye model implemtasi kebijakan dari Dye sering disebut juga dengan istilah model implemetasi interaktif model ini menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proseses dinamis karena setiap pihak yang terlibat dalam berbagai tahap

pelaksanaan hal itu dapat dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan

Charles O. Jones menurut Jones (1996:296) dalam melaksanakan aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama

- a. Organisasi pembentukan atau penataan ulang sumberdaya unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak
- b. Interpretasi menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengaruh yang tepat dapat diterima serta dilaksanakan





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Oprasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

1. Definisi Konsep Penelitian . of concerning people in general provided. Especially by central or local goverment for the use of people in general of or engaged in affairs. entertainment, service, etc. of the people open or known to people in general (dim. Leo Agustino 2017:7) Dari pengertian ini, kata 'publik dalam bahasa inggris sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak
2. Implementasi kebijakan menurut thomas R.Dye menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan
3. Kebijakan publik menurut Theodoulou (1995: 7) Kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber daya, perilaku, melindungi hak-hak dasar dan lainnya.
4. George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi, terdapat variabel yang sangat menentukan sikap suatu kebijakan. Yaitu :(i) Komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi ,(iv) struktur birokrasi

5. Marilee S.Grindle(1980) di pengaruhi oleh dua variable yakni isi kebijakan (context of policy)dan lingkungan implementasi(context of implementation) yaitu(i) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan ,(ii) jenis manfaat yang diterima oleh target group ,(iii) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
6. Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier 1983 ada tiga kelompok variable ;
- a. karakteristik dari masalah tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah di pecahkan (trac tability of the problems),
 - b. karakteristik kebijakan / undang –undang (ability of statute to stucture implementation) kejelasan dari isi kebijakan ini berarti semakin jelas dan semakin rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tibdakan nyata ,
 - c. variabel lingkungan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima progam –progam pembaruan di banding dengam masyarakat yang masih tertutup dan tradisional

7. Donald .S van meter dan carl E.van Horn (1975) standar dan sasaran kebijakan,sumberdaya ,komunikasi antar organisasi dan pengaruh aktivitas ,karakteristik agen pelaksana,dan kondisi sosial ekonomi dan politik

- a. standar dan sasaran kebijakan harus jelas terukur sehingga dapat di realisir
- b. sumberdaya imple mentasi kebijakan perlu di dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).
- c. hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instalasi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana. yang dimaksud karak-teristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor. disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni :

- a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan ;
 - b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan
 - c) Intesitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
8. David L weimer dan aidan R vining (1999) Dalam pandangan weimer dan vining (1999;396) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu progam ,yakni(i) logika kebijakam (ii) lingkungan tempat kebijakan dioprasikan dan(iii) kemampuan implementor kebijakan
 9. Kartu Identitas Anak adalah bukti identitas resmi untuk anak dibawah 17 tahun yang berlaku selayaknya kartu tanda penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya
 10. Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamatkan dalam Undang –Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 11. Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan Kabupaten indramayu.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Tabel 1.1

Operasional Konsep Penelitian

Konsep/variabel	Dimensi	Parameter
Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III Leo Agustino 2017: 136-141)	Komunikasi (comunication)	1. Penyampaian sosialisasi atau penyuluhan Kartu Identitas Anak. 2. Konsistensi Penyuluhan atau sosialisai Kartu Identitas Anak. 3. Kejelasan sosialisasi Kartu Identitas Anak .
	Sumber Daya (Resources)	1. Sumber Daya manusia 2. Kelengkapan sarana dan prasarana 3. Ketersedian Dana
	Disposisi (Dispositions)	1. Komitmen Pegawai 2. Kemampuan Pegawai
	Struktur Organisasi (Bureaucratic Sructure)	1. SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Kordinasi dengan sekolah di Kabupaten indramayu

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif. Menurut Sueivono (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang kualitas penelitian instrumen berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas data yang berkenaan ketepatan cara-cara benang yang digunakan untuk mengumpulkan data instrumen dalam Penelitian Kualitatif dapat berupa tes, pelatihan, observasi, dan kuesioner.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informasi

Pada penelitian kualitatif disebut informan atau subjek penelitian, orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai sesuai tujuan penelitian. Disebut subjek riset, karena informan aktif mengkonstruksi realitas. Pemilihan informan dalam penelitian ini tak terkalahkan dengan keterkaitannya pada tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian, informan yang akan dipilih adalah:

1) **Informan Kunci**

Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sebagai key informan (informan kunci), dan

2) **Informan Pendukung**

Para pegawai (Staff, Humas, dan Kasi) sebagai informan pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian yang disesuaikan dengan jenis Penelitian Kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan, data sekunder berasal dari dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap.

1. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui informan. Informasi dalam penelitian ini merupakan orang yang ketakutan dan mengerti dengan masalah yang akan diteliti sehingga dapat memberikan data yang diperlukan dan tidak dapat dipercaya kebenarannya.
2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah arsip yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antar lain surat keputusan. Peraturan perundangan, laporan penelitian, data statistik, kelembagaan data, pemerintah dan lembaga lainnya, baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, dokumen yang berupa foto-foto, serta naskah-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendeskripsikan fenomena penelitian. teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan Pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku literatur, arsip, laporan dinas, monografi, internet, peraturan perundangan, serta sumber tertulis lainnya.
- b. Observasi Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
- c. Wawancara Tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interview). Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan informan.
- d. Dokumentasi Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh dengan suatu foto-foto kegiatan selama penelitian, struktur organisasi foto, dan lain sebagainya.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang tidak dapat dipercaya. Menurut Moeleoang (2010: 330), keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Izin keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data yang diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan cara check, recheck, dan cross check terhadap data itu. Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut

- a) Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan para informan
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang saling berkaitan.

Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data atau informasi dari wawancara.

1.8.5 Analisis Data

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian adalah teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis secara mendalam berbagai data yang diperoleh.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi data, menampilkan data dan penarikan kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yaitu pemilihan data yang diperoleh, dikumpulkan, kemudian dirinci secara sistematis dan memilih pokok-pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan memberikan deksripsi dan analisis yang lebih tajam.

2. Diaplay Data

Yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deksriptif.

3. Verifikasi Data

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dilaksanakan dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian

1.9 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Singajaya, kec. Indramayu,

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kode pos 45218, pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya masalah yang harus dicari permasalahan dan solusinya.
2. Data adanya yang akan mendukung penelitian.
3. Lokasi yang paling mudah dicapai peneliti.



